

Implementasi Kesesuaian Pencatatan Keuangan pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 05

Cindy Lutfiana Ganie

Politeknik Negeri Jember

Rahma Rina Wijayanti

Politeknik Negeri Jember

Alamat: Jl Mastrip Po Box 164 Jember

*Korespondensi penulis: rahma@polije.ac.id

Abstrak. *Financial information presented in transparent and accountable and support the concept of good governance. Government Accounting Standards as the basis for reported of financial statements. Health facilities are one of those that need to be reviewed for implementation conformity the inventory accounting records based on Government Accounting Standards Statement Number 05. The research method used is a qualitative data with interview as data collection technique and documentation of financial statements. The results of the study indicate that the conformity between inventory accounting report in health facilities x has been implemented well.*

Keywords: *Financial reporting, Government Accounting Standards Statements Number 05 on Inventory Accounting, Good Governance*

Abstrak. Informasi keuangan yang disajikan secara transparan dan akuntabel dan mendukung konsep tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Standar Akuntansi Pemerintah sebagai dasar pencatatan laporan keuangan. Fasilitas kesehatan (fakes) salah satunya yang perlu ditinjau implementasi kesesuaian pencatatan akuntansi persediaan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 05. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi atas laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesesuaian antara pencatatan akuntansi persediaan di fakes x telah diimplementasikan dengan baik.

Kata Kunci: *Pelaporan Keuangan, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan, Good Governance*

PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi keuangan tampak atas hak masyarakat dalam hal anggaran mulai dari perencanaan hingga pelaksanannya (Ujianto; Srie Hartutie Moehaditoyo dan H.M.Amin, 2017). Informasi keuangan yang transparan wujud dari keterbukaan pengelolaan anggaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Akuntabilitas pengelolaan atas keuangan negara wujud dari pertanggungjawaban merupakan bentuk dari tata kelola pemerintah yang baik atau *good governance* (Lumenta et al., 2021). Akuntabilitas atas keuangan organisasi perangkat daerah juga sebagai hasil dari transparansi atas informasi pelaporan keuangan (Putra et al., 2018). Dasar aturan yang menanungi pelaporan keuangan yang sesuai standar adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (BPK, 2010). Pelaporan keuangan yang sesuai standar akan dijadikan dasar untuk proses pengambilan keputusan utamanya akun persediaan yang tinggi risikonya jika kurang tepat implementasinya (Finishtya & Safitri, 2022).

Implementasi akuntansi persediaan termuat dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) khususnya pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 05. Berdasarkan PSAP No. 05 persediaan sebagai bagian dari aset lancar yang berwujud barang maupun perlengkapan dan digunakan dalam kegiatan operasional serta sebagai barang yang akan

diperjualbelian atau juga berupa jasa pelayanan (BPK, 2010). Organisasi perangkat daerah yang standar pelaporan keuangannya juga adalah SAP adalah pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas. Fasilitas kesehatan berupa puskesmas memberikan layanan tingkat pertama tentu dibutuhkan pelaporan pengungkapan persediaan yang sesuai standar (Kesehatan, 2024).

Penerapan akuntansi persediaan telah dilakukan pada dinas kesehatan di Manado dengan hasil yang menunjukkan persediaan dalam bentuk obat-obatan dan alat tulis kantor telah sesuai dengan PSAP No.05 (Umboh & Tinangon, 2021). Penelitian tentang akuntansi persediaan di BKKBN Papua juga telah sesuai penerapan standar PSAP 05 (Simanjuntak et al., 2023). Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yakni penelitian ini lebih diarahkan pada fasilitas kesehatan x karena terkait pelaporannya pernah ada selisih penghitungan persediaan. Oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi kesesuaian dari pengungkapan pelaporan terkait persediaannya dengan PSAP No. 05.

KAJIAN TEORI

Praktik *good governance* sebagai bentuk konsep tata kelola pemerintah terkait juga tentang akuntabilitas kepada masyarakat (Khairudin et al., n.d.). akuntabel juga menjadi salah satu prinsip dalam pengelola pemerintah yang baik. Tata kelola pemerintah yang baik berdasarkan United Nation Development Programe / UNDP memiliki beberapa prinsip yakni partisipasi, transparansi, akuntabel, efektif dan efisien, kepastian hukum, konsensus dan setara (United National Development Program, 1997). Jika didasarkan pada pencatatan akuntansi persediaan maka prinsip transparan dan akuntabel pada konsep *good governance* tepat jika mendasari hal tersebut.

Adanya dasar teori dan dalam penerapan pencatatan keuangan di sektor publik juga mengacu dalam sebuah pedoman yakni Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 05 sebagai bagian dari SAP mengatur tentang akuntansi persediaan. Definisi dari persediaan sebagai aset lancar yang dikelompokkan sebagai barang atau perlengkapan sebagai bagian dari kegiatan operasional dan atau barang-barang yang diperjualbelikan serta sebagai bentuk pelayanan pada publik (BPK, 2010). Kegiatan pencatatan persediaan atas beban persediaan dicatat sebesar jumlah pemakaianya. Pencatatan dapat berupa metode perpetual dan periodik disesuaikan kebutuhan penggunaan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer yang digunakan berdasar dari sumber data yang didapat langsung (Sugiyono, 2013). Teknik pengumpulan data melalui metode wawancara semi terstruktur dan data analisa dokumen laporan keuangan. Teknik analisa data atas data yang diperoleh dilakukan penyusunan dan uji keabsahan melalui triangulasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi pencatatan akuntansi persediaan didasarkan pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP). Adanya kesesuaian pencatatan didasarkan pada PSAP No. 05 tentang Akuntansi Persediaan. Standar tersebut mengatur mulai dari klasifikasi atas pengajian

akun persediaan, pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan pengungkapan. Pencatatan yang kurang sistematis terkait akun persediaan pada fasilitas kesehatan x sehingga diperlukan analisa mendalam terkait kesesuaianya dengan standar akuntansi.

Fasilitas kesehatan erat kaitannya dengan persediaan obat-obat serta bahan habis pakai. Pencatatan keuangan atas akun persediaan sesuai dengan jumlah penggunaannya. Pemasukan dan pengeluaran atas persediaan dicatat dalam akun beban persediaan. Pencatatannya juga dilakukan rutin per akhir periode.

“iya dicatat beban persediaan sebesar pemakaianya” (Bendahara keuangan)

Bendahara keuangan mengungkapkan bahwa pencatatan akun beban persediaan disesuaikan dengan jumlah penggunaan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan bendahara obat.

“iya sebesar pemakaian persediaannya itu.” (bendahara obat)

Pembanding hasil pernyataan atas analisa kesesuaian pencatatan akun persediaan telah dilakukan pada bendahara barang, bendahara keuangan, dan bendahara obat. hal ini karena ketiganya yang bertanggungjawab atas pencatatan akuntansi persediaan pada fasilitas kesehatan (fakes) tersebut.

*“disini persediaan dicatat di buku tadi, setiap barang keluar itu
dicatat dalam kartu barang”* (bendahara barang)

Pencatatan atas keluar masuk barang disampaikan dengan jawaban yang sama pula oleh bendaharan barang dan bendahara keuangan. Hasil pernyataan tersebut diperkuat dengan melihat kesesuaian antara laporan keuangan di fakes dengan PSAP 05 tentang akuntansi persediaan.

Poin terkait beban persediaan yang dicatat sebesar pemakaianya di standar telah sesuai dengan yang dilakukan fakes x. Adanya beban persediaan yang dilakukan perhitungan dalam penyajian laporan keuangan juga disajikan dalam laporan keuangan fakes x. Laporan keuangan yang dimaksud adalah catatan atas laporan keuangan dengan pencatatan menggunakan metode perpetual. Pencatatan dengan metode perpetual dilakukan pula di Dinas Koperasi dan persediaan didasarkan pada jumlah yang dipakai (Assa et al., 2023). Adanya kesesuaian pula dengan pencatatan yang terstandar dan diberi opsi perpetual atau periodik pada fakes x. Metode perpetual digunakan sebagai metode pencatatan beban persediaan. Tata kelola pencatatan keuangan telah diterapkan dengan baik. Hal tersebut mendukung konsep *good governance* khususnya pada prinsip transparan dan akuntabel.

KESIMPULAN

Kesesuaian antara pencatatan akuntansi persediaan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan 05 telah diterapkan. Fasilitas kesehatan x telah menerapkan pencatatan beban persediaan dan disusun dalam laporan akuntansi secara berkala. Metode pencatatan perpetual digunakan disesuaikan dengan arus keluar barang persediaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Assa, J. R., Pangerapan, S., & Wokas, H. R. N. (2023). Evaluasi Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 05 Tentang Akuntansi Persediaan Pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Utara. *Evaluasi Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 05 Tentang Akuntansi Persediaan Pada Dinas Koperasi Dan UMKM Provinsi Sulawesi Utara*, 6(2), 1547–1558.
- BPK. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)*.

- <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Finishtya, F. C., & Safitri, T. N. (2022). Implementasi PSAP No.05 Atas Akuntansi Persediaan Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 23(2). <https://doi.org/10.29040/jap.v23i2.7229>
- Kesehatan, M. (2024). *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat*.
- Khairudin, S. E. M. S. A., Drs. Soewito, M. M., Aminah, S. E. M. S. A., & Utami, R. (n.d.). *MEMBANGUN KEPERCAYAAN PUBLIK DI INDONESIA: PERAN GOOD GOVERNANCE DAN E-GOVERNMENT*. AMERTA MEDIA.
<https://books.google.co.id/books?id=zYFzEAAAQBAJ>
- Lumenta, C. P., Morasa, J., & Pinatik, S. (2021). Akuntansi Persediaan Barang Atau Perlengkapan Berdasarkan PSAP Nomor 05 Pada Kantor Kepolisian Resor Bolang Mongondow Selatan. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 5(1), 146–154.
- Putra, R., Ardhiarisca, O., Wijayanti, R. R., & Pratiwi, B. Y. (2018). Evaluasi Perkembangan Dan Transparansi Laporan Keuangan. *Seminar Nasional Teknologi Informasi Dan Komunikasi, March*, 156–166.
- Simanjuntak, V., Sudarwadi, H., & Parastri, D. H. (2023). *Analisis Akuntansi Persediaan Berdasarkan PSAP No 05 Tahun 2010 Pada Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat*. 3(2), 1–13.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*.
- Ujianto; Srie Hartutie Moehaditoyo dan H.M.Amin. (2017). *Keuangan Negara*.
- Umboh, A. D., & Tinangon, J. J. (2021). Analisis Perlakuan Akuntansi Persediaan PSAP No. 5 pada Dinas Kesehatan Kota Manado. *Jurnal EMBA*, 9(5), 967–974.
- United National Development Program. (1997). (Communications Development Incorporated USA, Ed.) Addis Ababa, Ethiopia: *UNDP Governance Policy Paper*.
- Yabbar, R., & Hamzah, A. (2016). *Tata Kelola Pemerintahan Desa*. Penerbit Pustaka.